

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pangan

Pangan ialah semua yang berasal dari sumber daya hayati dan juga air, baik itu diolah maupun tidak diolah sehingga makanan dan minuman tersebut dapat dikonsumsi bagi kehidupan manusia, termasuk bahan pangan dan bahan baku lainnya yang dapat digunakan pada proses penyiapan, pembuatan dan pengolahan makanan dan minuman UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan.

Menurut Almatsier (2001) dalam bukunya “Prinsip Dasar Ilmu Gizi” pangan adalah semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang.

Dari uraian diatas pangan dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok bagi setiap manusia dalam memenuhi kelangsungan hidup. Pangan yang dikonsumsi harus pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang aman akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, bermutu artinya pangan yang dikonsumsi mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, sedangkan pangan yang bergizi adalah pangan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan manusia dan kesehatan manusia.

Dikawasan Asia sendiri terkhusus Indonesia beras ialah pangan pokok, dimana masyarakatnya memiliki stereotip bahwa apabila sehari belum makan nasi berarti belum makan, padahal makanan lainnya seperti jagung, sagu, ketela ataupun

umbi umbian ialah makanan substitusi pengganti nasi yang memiliki karbohidrat, namun karena kebiasaan makan nasi inilah yang membuat masyarakat apabila tidak makan nasi tidak terasa kenyang bahkan merasa belum makan, oleh sebab itu, Dewan Ketahanan Pangan (2015) mencanangkan gerakan Dewan Ketahanan Pangan (2015) “*One Day, No Rice*”, hal ini bertujuan apabila nanti stok dari beras menipis maka ada peanekaragaman bahan pangan yang bisa dijadikan substitusi pengganti nasi agar masyarakat tak memiliki masalah pada rawan pangan.

B. Pengertian Rawan Pangan

Rawan pangan memiliki definisi dimana daerah, masyarakat atau rumah tangga tidak bisa mencukupi kebutuhan akan pangannya dalam memenuhi kebutuhan fisiologis pertumbuhan serta kesehatan. Menurut Sumarni (2012) bahwa pengertian rawan pangan (*food insecurity*) ialah kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses serta memenuhi kebutuhan pangannya hingga mengakibatkan turunya kualitas hidup masyarakat.

Badan Ketahanan Pangan (2016) mengklasifikasikan kerawanan pangan dari sifatnya menjadi dua yaitu:

1. Kerawanan kronis, yaitu kondisi dari terbatasnya sumber daya alam serta rendahnya sumber daya manusia dan memberikan akibat kekurangan pangan yang menjadi salah satu akar dari kemiskinan.
2. Kerawanan Transient, yaitu kondisi yang disebabkan kejadian yang tak diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang buruk, atau konflik sosial pada masyarakat hingga terjadi kerawanan pangan.

Menurut Maryono (2004) ada beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan suatu wilayah masuk dalam kategori rawan pangan atau tidak yaitu:

1. Pendidikan, dilihat dari tingkat pendidikan dan jumlah tingkat buta huruf.
2. Tenaga kerja, dilihat dari tingkat penduduk yang tak bekerja serta penduduk yang berada dibawah pendapatan per kapita atau biasa dikatakan penduduk miskin.
3. Kesehatan, dilihat dari jumlah tenaga kesehatan, tingkat harapan hidup jumlah balita kurang gizi serta tingkat kematian ibu melahirkan.
4. Kehutanan, dilihat dari degradasi lahan rawan banjir atau kekeringan.
5. Prasarana fisik, dilihat dari akses air bersih dan akses listrik.

Indikator lain juga dibuat oleh Dewan Ketahanan Pangan yang bekerja sama dengan *World Food Programme* (WFP) membuat *Food Insecurity Atlas* (FIA) tingkat kabupaten, pertama diluncurkan *Food Insecurity Atlas* pada tahun 2005, lalu diperbarui lagi dengan membuat *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) tahun 2009 berdasarkan kondisi pangan pokok disetiap wilayah di Indonesia yang mana ada 15 indikator yang dikelompokkan menjadi 4 dalam menetapkan suatu daerah termasuk rawan pangan, yaitu melalui pendekatan:

1. Indikator ketersediaan pangan.
2. Rasio konsumsi perkapita normatif terhadap ketersediaan beras.
3. Indikator akses pangan dan sumber nafkah.
4. Persentase orang miskin.
5. Persentase orang yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu.

6. Persentase orang yang tidak tamat SD.
7. Persentase akses rumah tangga ke fasilitas listrik.
8. Indikator pemanfaatan atau penyerapan pangan.
9. Tingkat harapan hidup anak umur 1 tahun.
10. Persentase bayi yang kurang gizi.
11. Persentase anak yang tidak diimunisasi.
12. Persentase perempuan buta huruf.
13. Persentase orang yang tinggal lebih dari 5 km dari puskesmas.
14. Perbandingan jumlah dokter yang disesuaikan kepadatan penduduk.
15. Indikator kerentanan pangan.
16. Jumlah areal hutan.
17. Jumlah areal degradasi.
18. Jumlah areal penanaman padi yang mengalami puso.

Menurut Lapan (2010) dalam menentukan tingkat kerawanan pangan ada beberapa faktor fisik dan non fisik (sosial ekonomi) yang menentukan yaitu:

1. Secara fisik yaitu ditentukan oleh faktor keberhasilan panen, luas panen tingkat produktifitas tanaman pangan yang dipengaruhi faktor iklim.
2. Sosial-Ekonomi yaitu ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, daya beli masyarakat, aksesibilitas, dan distribusi pangan.

Daerah rawan pangan sendiri diidentifikasi melalui pendekatan analisis keseimbangan antara supply serta produksi dengan kebutuhan demand atau

konsumsi pangan. Pendekatan ini digunakan sebagai batasan untuk menentukan potensi daerah yang mengalami rawan pangan.

Dinas Pertanian menentukan indikator untuk mengetahui suatu wilayah mengalami rawan pangan atau tidak dengan melihat beberapa indikator yang mempengaruhi rawan pangan yaitu:

1. Indikator produksi, dilihat dari rasio ketersediaan pangan yang dibandingkan dengan kebutuhan pangan, apabila rasio ketersediaan produksi pangan dibandingkan kebutuhan $< 0,95\%$ dianggap memiliki rasio yang tinggi terhadap kondisi rawan pangan.
2. Indikator sosial ekonomi, dilihat dari rasio keluarga miskin terhadap total keluarga pada wilayah terkait, apabila rasio keluarga miskin pada total keluarga pada wilayah terkait $> 40\%$ maka memiliki rasio yang cukup tinggi pada kerawanan pangan.
3. Indikator kesehatan, dilihat prevalensi kurang energi protein (KEP) pada balita, apabila prevalensi KEP $> 40\%$, maka memiliki resiko yang tinggi pada kerawanan pangan.

C. Definisi Kemiskinan

Ada banyak definisi yang menjelaskan kemiskinan seiring dengan kompleksnya indikator penyebabnya. Kemiskinan tak hanya berpusat pada masalah ekonomi saja namun telah meluas pada hal lainnya seperti kesehatan, sosial, pendidikan, dan politik.

Kemiskinan secara singkat diartikan ketidakmampuan seseorang memenuhi standar minimum kebutuhan dasar seperti pangan maupun nonpangan BPS, Data Dan Informasi Kemiskinan (2015)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (2004) kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam mengakses atau memperluas pilihan hidup seperti tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik.

Sedangkan BAPPENAS (2004) kemiskinan ialah kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat yaitu terpenuhinya kebutuhan akan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan, ancaman kekerasan, dan hak mengikuti kegiatan sosial politik bagi laki laki maupun wanita. Pemahaman tentang kemiskinan utamanya mencakup beberapa hal seperti:

1. Pemahaman bahwa kemiskinan ialah kurangnya materi atau kebutuhan pangan sehari hari, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Konsepnya sendiri kemiskinan dipahami sebagai kondisi dimana langkanya barang dan pelayanan dasar.
2. Kemiskinan adalah tak terpenuhinya kebutuhan sosial dan terkucilkannya kehidupan sosial dan tidak mampu melakukan partisipasi pada masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan serta informasi. Keterkucilan pada lingkungan

sosial biasanya dibedakan melalui kemiskinan karena mencakup masalah politik serta moral yang tak dibatasi pada bidang ekonomi.

3. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya penghasilan dan kekayaan yang memadai, makna memadai memiliki artian yang berbeda melintasi bagian politik serta ekonomi di berbagai negara.

D. Mengukur Kemiskinan

Badan Pusat Statistika dalam mengukur kemiskinan menggunakan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang diukur dengan hitungan indeks per kepala (*Head Count Index*) yaitu mengukur jumlah dan persentase penduduk yang berada pada garis kemiskinan. Ukuran garis kemiskinan nasional dilihat dari jumlah rupiah yang dikeluarkan individu untuk makan yakni sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari, dan memenuhi kebutuhan sandang, papan, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan aneka macam barang serta jasa lainnya. Penduduk miskin ialah seseorang yang tak mampu memenuhi kebutuhan dan pengeluaran yang lebih rendah dari garis kemiskinan yang telah ditentukan. Standar dalam pengukuran kemiskinan yang dipakai oleh BPS bersifat dinamis yang disesuaikan dengan pola konsumsi agar lebih realistis.

Di Indonesia salah satu cara mengukur kemiskinan ialah dengan mengukur derajat ketimpangan pendapatan seperti menghitung koefisien dari indeks gini antara masyarakat miskin ataupun koefisien pendapatan antara masyarakat miskin. Koefisien gini serta koefisien pendapatan sendiri memiliki peran penting untuk diketahui karena didalamnya dapat dilihat dampak guncangan perekonomian yang terjadi pada masyarakat miskin yang berbeda pada tingkat dan distribusi sumber

daya diantara masyarakat miskin. Dalam mengukur kemiskinan sendiri ada beberapa aksioma-aksioma maupun prinsip yang perlu di perhatikan antara lain:

1. Prinsip *anonimitas*: mencakup ukuran cakupan dalam kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin maupun pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit.
2. Prinsip *monotonisitas*: bahwa jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya.

Parameter pendapatan digunakan UNDP untuk mengukur kemiskinan pada tahun 1997, UNDP juga melakukan cara lain dalam mengukur kemiskinan yaitu dengan Indeks kemiskinan Manusia (IKM) (*Human Poverty Indeks-HPI*) atau biasa yang selama ini disebut Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks-HDI*) yaitu kemiskinan yang diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*), yaitu kehidupan, Pendidikan dan ketetapan ekonomi.

Adapun 14 kriteria rumah tangga miskin menurut BPS, Data Dan Informasi Kemiskinan (2015), yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²/individu.
2. Lantai tempat tinggal berasal dari tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah.
3. Dinding tempat tinggal berasal dari bambu, rumbia, atau kayu berkualitas rendah.

4. Tidak memiliki fasilitas MCK pribadi keluarga.
5. Sumber penerangan rumah tangga bukan berasal dari listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Mengonsumsi susu dan sumber protein hewani, seperti: daging dan ayam hanya sekali dalam seminggu.
9. Membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000/bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan harga minimal Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit atau non-kredit), emas, hewan ternak, atau barang modal lainnya.

E. Ketahanan Pangan

Konsep Ketahanan pangan (*food security*) mulai berkembang pada tahun 1943 ketika diadakanya *conference of food and Agriculture* yang mencanangkan konsep *secure, adequate and suitabel supply of food for everyone*” menurut

International Food Policy Institute (IFPRI) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan dan ketahanan pangan pada tahun 1970-an saat terjadi krisis pangan global menjadi masalah ataupun isu dalam dunia Internasional Maxwell (2000).

Ketahanan pangan menurut FAO (2000) ialah kondisi dimana individu atau rumah tangga menerima akses secara fisik ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dan tidak beresiko kehilangan keduanya dan menurut *World Food Summit*, ketahanan pangan adalah kondisi seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, baik secara fisik, sosial ekonomi secara terus menerus serta memiliki akses memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terdapat pilihan makan untuk hidup yang aktif serta sehat Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, (2009).

Dari seluruh pengertian dan definisi dari ketahanan pangan di atas maka disimpulkan definisi dari ketahanan pangan ialah individu atau rumah tangga mendapatkan akses pangan disetiap waktu, lokasi dan terjangkau bagi semuanya, namun di Indonesia kebijakan pada ketahanan pangan pada era orde baru hanya mencakup pada aspek penyediaan pangan saja yang mana lebih dikenal dengan istilah *Food Availability Approach* (FAA) Rindayati (2009). Aspek pendekatan tersebut masih ada beberapa kelemahan yakni sebagian dari rumah tangga masih berada pada garis kemiskinan yang berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah karena didalamnya belum terkandung aspek pendekatan distribusi dan akses. Aspek ketersediaan pangan telah memenuhi dan cukup untuk permintaan konsumsi masyarakat, namun tentunya hal tersebut tidak dapat mencerminkan

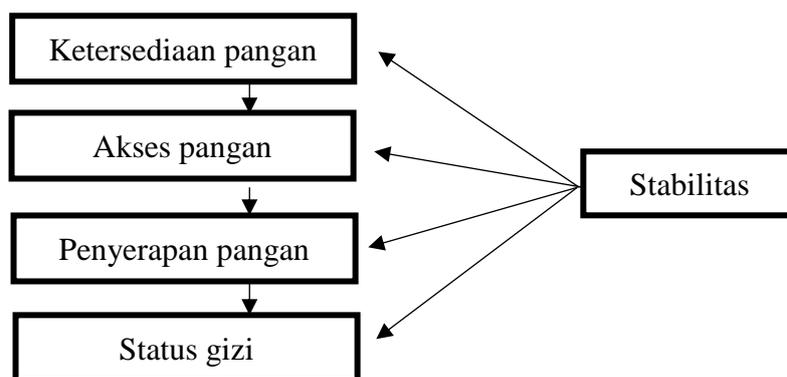
keadaan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pangan sehingga membuat pendekatan ketersediaan pangan tidak dapat mencerminkan ketahanan pangan, sehingga di Indonesia ketahanan pangan didefinisikan yang tertuang pada UU No. 7 tahun 1996 yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan untuk rumah tangga yang menfokuskan dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah serta mutunya, aman, merata serta terjangkau bagi rumah tangga dan di Indonesia mengalami pembaruan tentang pangan yang berlandaskan pada UU NO. 18 tahun 2012 bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya serta memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Terdapat tiga indikator yang menjadi subsistem pada ketahanan pangan yaitu subsistem penyediaan pangan, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya saling mempengaruhi secara berkesinambungan Rindayati (2009), sedangkan menurut Badan Ketahanan Pangan (2015) ada empat aspek utama yang membentuk ketahanan pangan antara lain:

1. Ketersediaan pangan, yakni tersedianya pangan secara fisik pada daerah yang didapatkan dari produksi domestik, impor ataupun bantuan pangan tapi ketersediaanya lebih diutamakan dari produksi domestik.
2. Akses pangan, yaitu kemampuan rumah tangga dalam memperoleh kecukupan pangan, baik berasal dari produksi sendiri maupun pembelian, barter, hadiah, pinjaman, serta bantuan atau dari kelimanya semua.

3. Penyerapan pangan, dilihat dari penggunaan akan pangan oleh anggota keluarga pada msyarakat.
4. Satus gizi merupakan *outcome* dari ketahanan pangan.

Apabila salah satu dari subsistem tersebut tak dipenuhi maka suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik, walaupun pada tingkat nasional serta regional pangan tercukupi namun apabila seseorang tidak dapat mengakses dari ketersediaan pangan maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan berada dalam posisi yang rapuh



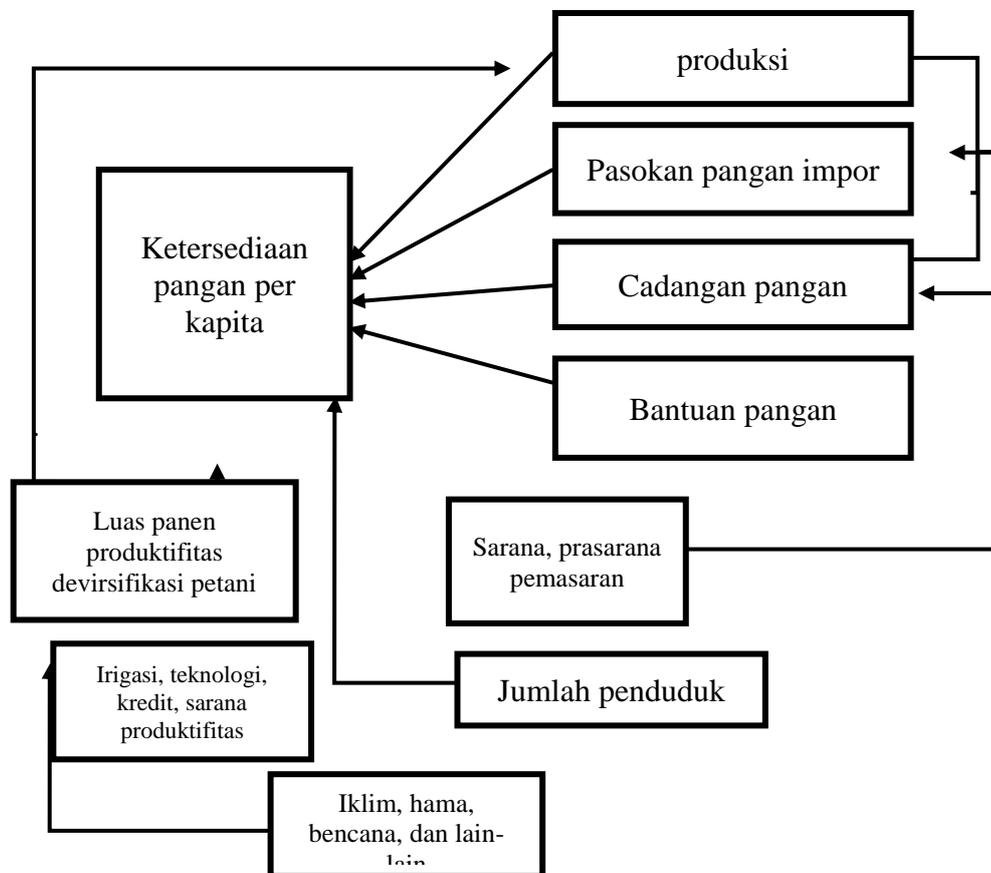
Sumber: (USAID, 1992) dan (Weingartner, 2004)

Gambar 2. 1
Sub Sistem Ketahanan Pangan

Indikator mengenai ketahanan pangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Ketersediaan (*food availability*).

Definisi dari ketersediaan pangan ialah suatu kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pangan pada jumlah yang cukup aman, bergizi dan sehat yang berasal dari produksi negara sendiri ataupun impor, maupun bantuan pangan sehingga dapat terpenuhinya jumlah kalori yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat.



Sumber: (Webb, P., & Rogers, B. L, 2003)

Gambar 2. 2
Sub Sistem Ketersediaan Ketahanan Pangan

2. Indikator Akses Pangan (*food access*).

Indikator akses pangan ialah semua individu atau rumah tangga dengan kemampuan sumber daya yang ia miliki untuk memperoleh pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang diperoleh dari produksi pangan pribadi ataupun pembelian dan bantuan pangan.

Ada beberapa akses rumah tangga maupun individu dalam pangan yaitu:

a. Akses ekonomi

Meliputi pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga.

b. Akses fisik

Menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi).

c. Akses sosial

Menyangkut tentang preferensi pangan.

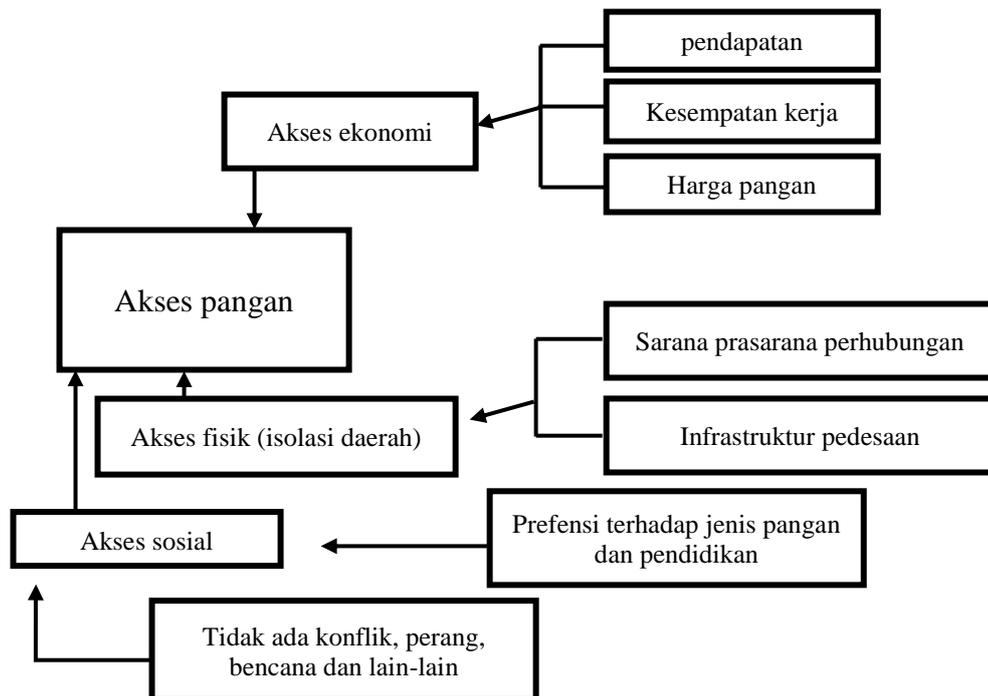
Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:

a. Akses secara langsung (*direct access*)

Rumah tangga yang memiliki lahan sawah maupun ladang.

b. Akses secara tidak langsung (*indirect access*)

Rumah tangga yang tidak memiliki lahan sawah maupun ladang.

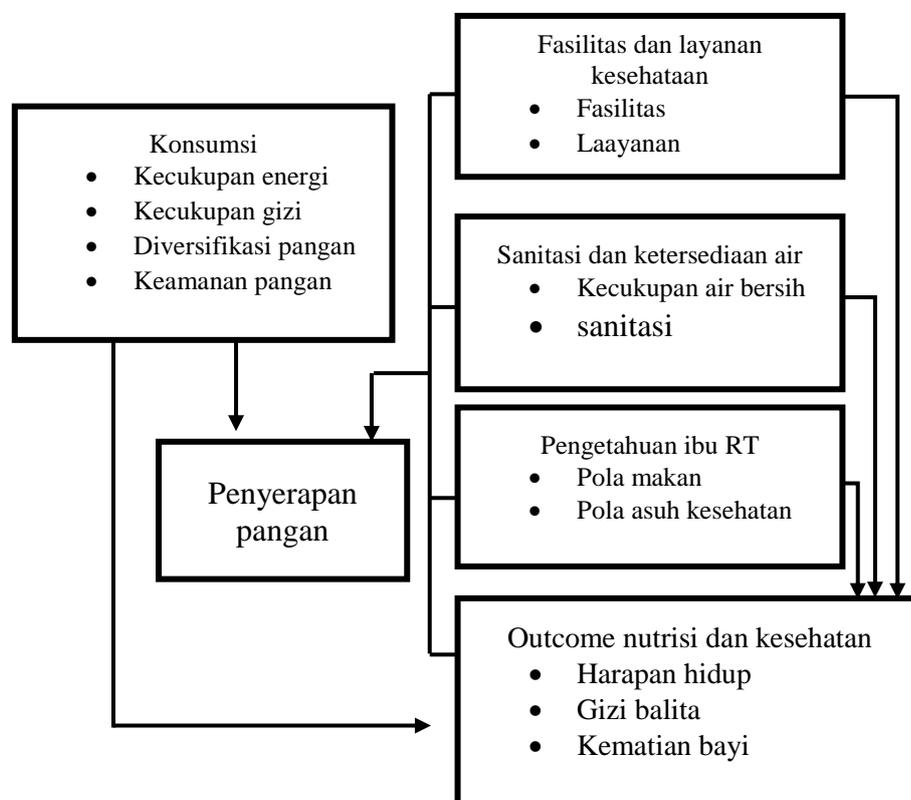


Sumber: (Webb, P., & Rogers, B. L, 2003)

Gambar 2.3
Sub Sistem Akses Pangan

3. Indikator Penyerapan Pangan (*food utilization*).

Kebutuhan seseorang untuk hidup sehat dalam menggunakan pangan seperti kebutuhan akan energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan, pengetahuan anggota rumah tangga pada sanitasi, ketersediaan air, fasilitas layanan kesehatan, penyuluhan gizi, dan tingkat kesehatan balita sangat efektif dalam penyerapan pangan.



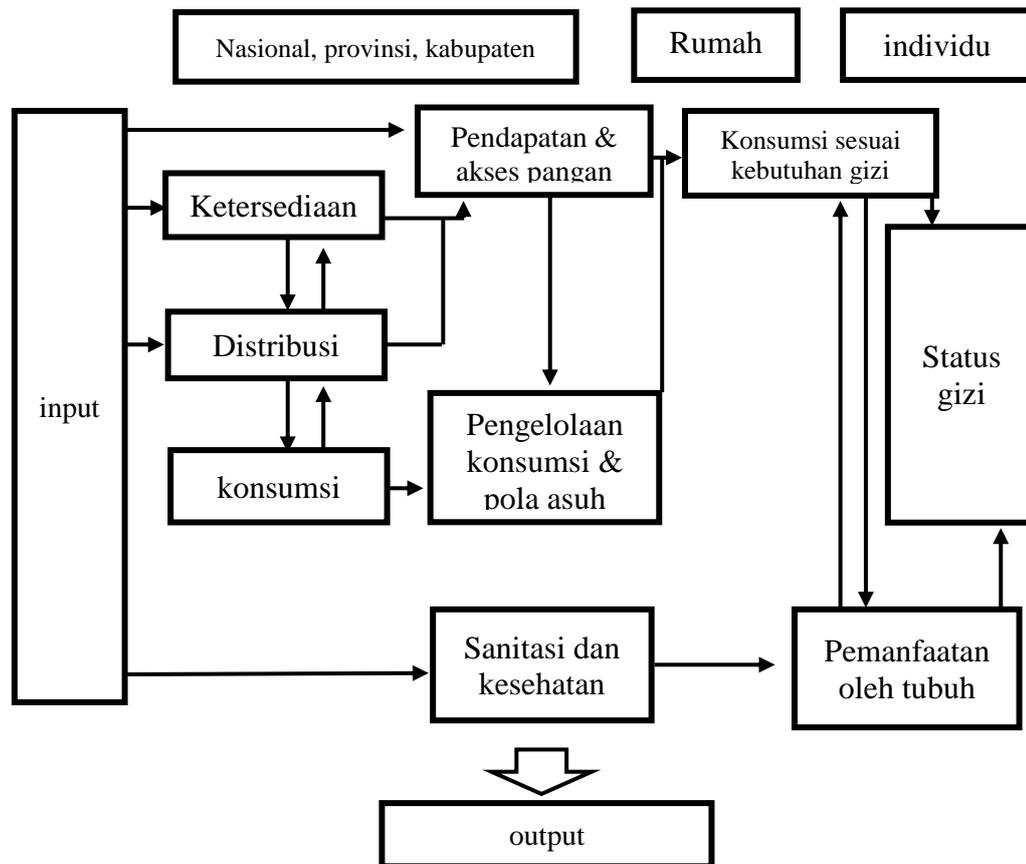
Sumber: (Webb, P., & Rogers, B. L, 2003)

Gambar 2. 4
Sub Sistem Penyerapan Pangan

4. Status gizi (*Nutritional status*)

Status gizi ialah *outcome* yang berasal dari ketahanan pangan yang memiliki ki definisi sebagai cerminan dari kualitas hidup seseorang baik atau buruk, tatus gizi dihitung berdasarkan angka harapan hidup, tingkat gizi balita, dan kematian bayi.

Sistem ketahanan pangan dan gizi seperti yang telah dijelaskan pada pengertian sebelumnya tidak hanya menyangkut pada produksi, distribusi, dan penyediaanya pada tingkat regional maupun nasional, namun juga menyangkut aspek akses pangan di tingkat regional maupun nasional pada tingkat makro namun harus dilihat juga dari tingkat mikronya pada akses pangan pada tingkat rumah tangga atau individu dan status gizi dari setiap anggota rumah tangga terutama pada anak dan ibu hamil pada rumah tangga miskin, pada target awal dalam *Millenium Development Goals* (MGDs) tidak hanya pada capaian tingkat produksi atau penyediaanya namun bagaimana menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang menjadi indikator dari sejahteranya masyarakat.



Sumber: (Webb, P., & Rogers, B. L., 2003)

Gambar 2.5
Sistem Ketahanan Pangan di Indonesia

Pada MDGs pelaksanaannya lebih menekankan pada dampak pada masukan yakni dari dua ukuran kelaparan, yakni jumlah konsumsi energi (kalori) pada rata rata anggota keluarga dibawah kebutuhan hidup sehat dan proporsi balita yang kekurangan gizi, sehingga dalam menganalisis situasi dari ketahanan pangan baiknya diawali dari hal yang terkecil yaitu evaluasi pada status gizi kemudian tingkat konsumsi, persediaan serta produksi pangan dan bukan sebaliknya. Status baik dari gizi masyarakat dapat menunjukkan keadaan bahwa tidak ada masyarakat yang menderita

kelaparan dan kekurangan gizi. Keadaan ini secara singkat menggambarkan pelayanan sosial dan akses pangan yang cukup baik dan merata, apabila produksi dan persediaan pangan melebihi kebutuhan yang ada, hal ini tidak menjamin terbebasnya masyarakat dari kurang gizi dan kelaparan yang mana tujuan awal dari ketahanan pangan ialah untuk diorientasikan guna mencapai kedaulatan akan pangan seperti pemenuhan atas hak pangan, peningkatan kualitas SDA serta ketahanan pangan pada tingkat nasional.

F. Status Sosial Ekonomi

Status sosial didefinisikan strata, kedudukan maupun perbedaan kelas sosial tiap individu. Status sosial menurut ilmu sosiologi disebut sebagai “*sosial stratification*” diartikan masyarakat dapat dibedakan dalam kelas-kelas sosial yaitu kelas tinggi maupun kelas rendah. Kelas sosial diartikan sebagai kedudukan yang berada di masyarakat dan diakui seluruh lapisan dalam masyarakat, baik lingkup keluarga maupun masyarakat umum Jatmika (2015)

Indikator maupun kriteria dalam menggolongkan masyarakat menurut Soekanto (2007) yaitu:

1. Indikator Kekayaan

Kekayaan dalam masyarakat dijadikan sebagai ukuran, apabila masyarakat mempunyai materi paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Materi ataupun kekayaan tersebut berupa bentuk mobil pribadi, rumah dan lain-lain.

2. Indikator Kehormatan

Seseorang yang menjadi panutan dalam masyarakat yang selalu dihormati, disegani serta mendapatkan tempat yang teratas, hal semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional.

3. Indikator Pendidikan

Pendidikan menjadi tolak ukur masyarakat menganggap semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi dalam lapisan masyarakat

4. Indikator Kekuasaan

Semakin tinggi seseorang mempunyai wewenang, maka semakin tinggi lapisan sosialnya, seperti jabatan dalam suatu instansi maupun organisasi.

Indikator-indikator diatas dapat menentukan sebagai dasar adanya lapisan masyarakat, akan tetapi menurut Lestari (2008) menjelaskan bahwa status sosial ekonomi dalam masyarakat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Aspek luas penguasaan lahan

Masyarakat dalam indikator ini biasanya sebagian besar para petani yang memiliki luas lahan 0,5 - 1 Ha dikatakan sedang, dan mayoritas para petani mendapatkan warisan dari orang tua dan dibagi-bagi dengan saudara-saudaranya.

2. Pekerjaan non pertanian

Pekerjaan merupakan suatu usaha manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pekerjaan diluar non pertanian juga dapat memberikan pemasukan bagi rumah tangga.

3. Pendapatan rumah tangga

Pendapatan merupakan penghasilan yang didapat seseorang atau rumah tangga dalam satuan waktu, per hari, per minggu, per bulan, maupun tahunan.

G. Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan merupakan ketetapan tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Kebijakan pemerintah didefinisikan sebagai keputusan yang sistematis dibuat oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan Kulon Progo yaitu:

1. Kebijakan Program KRPL

Konsep kebijakan dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah yang ramah lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan serta gizi rumah tangga sehingga dapat terjadi diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, dan dapat melestarikan tanaman pangan lokal sehingga dapat mengurangi kerawanan pangan. Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2013 sudah menggalakan program peragaman pangan, tahun 2016 ini yakni dilaksanakan pada 3 desa percontohan yaitu Hargowilis, Hargotirto, dan Tuksono.

2. Lumbung Pangan Desa

Lumbung pangan merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan ketahanan pangan. Upaya dalam merevilatisasi lumbung pangan penting untuk dilakukan melalui pemberdayaan sistematis dan berkesinambungan.

Dalam pengembangan lumbung pangan Kulon Progo melakukan pelatihan dan pemberdayaan kelompok lumbung pangan tahun 2016.

Tabel 2. 1
Jumlah Lumbung Pangan

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kalibawang	6
2	Samigaluh	4
3	Temon	1
4	Wates	1
5	Panjatan	1
6	Lendah	4
7	Sentolo	2
8	Pengasih	1
9	Kokap	6
10	Nanggulang	1
11	Giri mulyo	2

Sumber: Laporan triwulan Dinas Pertanian Kulon Progo, 2016

3. Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin atau rawan pangan menjadi masyarakat yang mandiri sehingga dapat mengurangi kemiskinan ataupun kekurangan gizi dan dapat mewujudkan ketahanan pangan. Pengembangan desa mandiri pangan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sudah di laksanakan.

Tabel 2. 2
Desa Mandiri Pangan Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa
1	Kokap	Hargowilis
2	Kokap	Hargorejo
3	Sentolo	Salamrejo
4	Sentolo	Tuksono
5	Lendah	Sidorejo
6	Lendah	Bumirejo
7	Wates	Giripeni

Sumber: Laporan triwulan Dinas Pertanian Kulon Progo, 2016 (Diolah)

a. Hubungan Status Sosial Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Menurut Josephine, Sinaga, Lubis, dan Darus (2017) kenaikan pendapatan menambah kenaikan pengeluaran pangan juga cenderung bagi ibu rumah tangga yang menambah atau mengubah menu makanan keluarga, baik dari segi kuantitas, kualitas, ataupun harga sehingga mempengaruhi ketahanan pangan.

b. Hubungan Kebijakan Pemerintahan dan Ketahanan Pangan

Menurut Siregar, Lubis, dan Emalisa (2013) mengemukakan bahwa hasil penelitian program Desa Mandiri Pangan (Demapan) berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sehingga hal ini akan meningkatkan ketahanan pangan.

H. Penelitian Yang Relevan

Hasil Penelitian dari Ike, Jacobs, dan Kelly (2017) dalam mengukur status ketahanan pangan rumah tangga di negara taraba, nigeria dengan membandingkan indikator ketahanan pangan, hasil penelitian Dengan membawa ketiga indikator HFIAS, DDS, dan CSI, menyelidiki kekuatan, ketahanan dan keberhasilan mereka dalam mengukur ketahanan pangan, sehingga status ketahanan pangan rumah tangga di Negara Bagian Taraba menunjukkan bahwa kerawanan pangan menyimpang dan parah di Negara Bagian Taraba.

Pratiwi, Rahayu, dan Utami (2015) dalam penelitiannya analisis ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi dan protein masih tergolong rendah masing-masing sebesar 67,44% dan 69,72%. Rata-rata pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga sebesar 62,08% terhadap total pengeluaran

konsumsi. Sementara itu jumlah rumah tangga sebesar 61,67% masuk pada kategori rawan pangan. Faktor yang berpengaruh nyata adalah pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan aset produktif.

Hasil penelitian dari Darwis, Supriyati, dan Rusastra (2013) mengenai analisis dampak Desa Mapan terhadap tingkat ketahanan pangan dan kemiskinan rumah tangga sebagai berikut: Pulau Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang lebih rendah, Desa Mapan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap peningkatan rumah tangga dengan katagori “sejahtera”, yaitu dari 1,30% menjadi 20,13%. Di luar Jawa dengan posisi awal tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Desa Mapan memberikan dampak positif yang relatif signifikan terhadap penurunan proporsi rumah tangga dengan katagori “sangat miskin” dan “miskin”, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan yang besar pada rumah tangga yang katagori “kurang sejahtera” dari 21,88% menjadi 43,28%. Dari analisis tingkat nasional dapat disimpulkan bahwa, Desa Mapan memberikan dampak positif seperti : terjadi penurunan jumlah rumah tangga miskin, dan pada saat bersamaan terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan rumah tangga sejahtera. Secara nasional rumah tangga “sangat miskin” menurun dari 15,54% menjadi 4,99% dan rumah tangga “sejahtera” meningkat dari 1,23% menjadi 10,33%.

Butrico (2013) melakukan penelitian yang berjudul mengidentifikasi ketahanan pangan di Islandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islandia adalah salah satu yang pertama menggunakan geothermal serta yang pertama menggunakan rumah kaca panas bumi. Penurunan industri Islandia dapat dikaitkan dengan banyak variabel, termasuk tidak mencukupi dukungan

pemerintah, jika industri pertanian geothermal mampu meningkatkan produksi ke tingkat yang dapat mempertahankan populasi jika makanan impor mengalami terganggu, akan mencapai tingkat ketahanan pangan nasional yang lebih tinggi dan akan bertindak sebagai sebuah model untuk negara-negara pengimpor-impor pangan lainnya untuk mengamankan metode internal yang berkelanjutan produksi makanan.

Panggabean, Theodora, Baliwati, Heryatno, dan Yayat (2013) melakukan analisis kerawanan pangan menurut kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2011. Hasil penelitian tersebut, masih terdapat 6 kecamatan yang tergolong dalam kategori rawan pangan (prioritas 2-3) dan 34 kecamatan tergolong tahan pangan (prioritas 4-6). 5 dari 6 kecamatan yang masuk pada kecamatan yang rentan terhadap kerawanan pangan memiliki ketersediaan pangan surplus.

Mustofa (2012) menganalisis ketahanan pangan rumah tangga miskin dan modal sosial di Provinsi DIY. Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial yang ada, baik di kalangan masyarakat rural maupun urban masih dalam tahap bonding (sebagai pengikat saja), belum sebagai jembatan (bridging) yang menghubungkan seluruh potensi warga. Rata-rata tertinggi ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pangan, dan kualitas pangan dimiliki rumah tangga miskin dari Kabupaten Gunungkidul. Rata-rata terendah ketersediaan pangan dan akses pangan dimiliki rumah tangga miskin dari Kabupaten Sleman. Adapun rata-rata terendah stabilitas pangan, dan kualitas pangan dimiliki rumah tangga miskin dari Kabupaten Kulon Progo. Desain pemanfaatan modal sosial untuk pencapaian

ketahanan pangan di Provinsi DIY dapat dirumuskan melalui model rural pertanian termasuk pegunungan dan model urban.

Wahyuni (2012) melakukan analisis ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata proporsi pengeluaran konsumsi pangan terhadap total pengeluaran adalah 75,77%. Artinya pengeluaran konsumsi pangan masih mengambil bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga miskin Kabupaten Sukoharjo. Hubungan antara proporsi pengeluaran konsumsi pangan dengan konsumsi energi protein adalah berlawanan. Kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kabupaten Sukoharjo terdiri atas kategori rawan pangan sebesar 80% dan rentan pangan 20%.

Napoli (2011) menganalisis mengenai indeks multidimensional kerawanan pangan (FIMI). Hasil yang muncul dari analisis indeks FIMI mendapat dukungan kuat dari literatur yang diakui, terutama saat menafsirkan perubahan signifikan dalam nilai negara. Konsistensi ini menunjukkan bahwa arah yang dilakukan dalam membangun FIMI dapat terjadi dianggap bermakna, sehingga merupakan landasan yang mendorong perkembangan selanjutnya dari indeks dan analisis penyebab kerawanan pangan di dunia. Temuan FIMI menunjukkan bahwa Afrika Timur dan Afrika Tengah atau Selatan adalah titik panas kerawanan pangan, sementara tren positif berlaku di Asia Tenggara dan Amerika Latin dan Karibia.

Prabowo (2010) bahwa untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek masih diperlukan kebijakan perlindungan petani

dengan pembatasan impor produk pertanian namun hendaknya didukung pula dengan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi domestik melalui upaya peningkatan produktivitas produk pertanian nasional, selain itu pula untuk daerah penghasil pertanian lainnya perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan luas panen, baik dengan perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun dengan jaminan ketersediaan irigasi dan input pertanian. Untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dikurangi secara bertahap namun kebijakan peningkatan produksi domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan peningkatan ketahanan pangan domestik atau lokal. Pengembangan teknologi pertanian juga di harapkan mampu meningkatkan sektor pertanian.

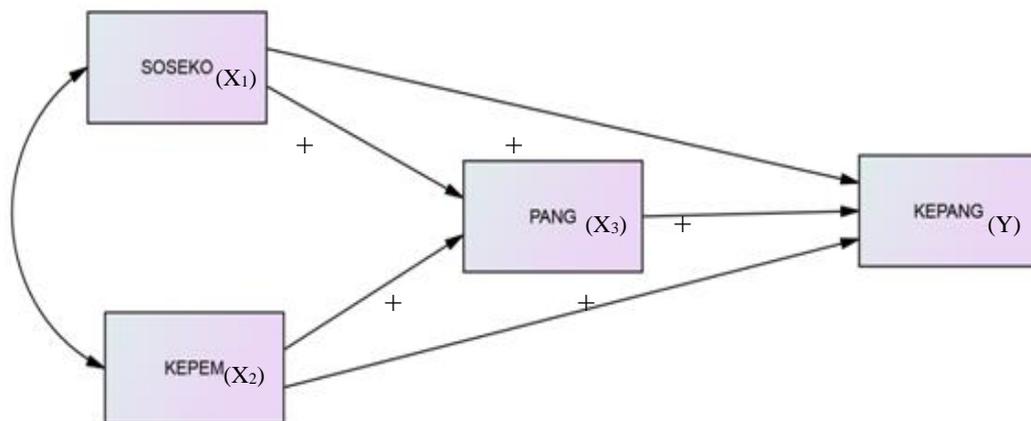
Alfiasari, Drajat, dan Darmawan (2009) melakukan penelitian modal sosial dan ketahanan pangan rumah tangga miskin di Kecamatan Tanah Sereal dan Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dengan metode cross sectional study. Hasil Penelitian menunjukkan kecukupan modal sosial lebih terlihat di Kelurahan Kedung Jaya dan keberadaan modal sosial tersebut berpotensi dalam menentukan ketahanan pangan rumah tangga miskin. Rumah tangga yang mempunyai kepercayaan lebih tinggi dalam menjalin hubungan tanpa rasa curiga mempunyai kepercayaan lebih tinggi dalam menjaga lingkungan menjadi nyaman. mempunyai hubungan sosialnya lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangganya.

I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul Sugiyono (2012) Berdasarkan kajian pustaka di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$$H_a: \beta \neq 0$$

1. Diduga melalui status sosial ekonomi dengan indikator pendapatan, dan pendidikan terdapat pengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo.
2. Diduga melalui kebijakan pemerintah yaitu KRPL, Lumbung Pangan, Desa Mandiri Pangan terdapat pengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo.



Sumber : Data Path Analysis 2017

Gambar 2. 6
Hipotesis Penelitian

SOSEKO (X₁) : Status Sosial Ekonomi

1. Pendidikan

2. Pendapatan

KEPEM (X₂) : Kebijakan Pemerintah

1. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
2. Program Lumbung Pangan
3. Program Desa Mandiri Pangan

PANGAN (X₃) : Pengeluaran Konsumsi Pangan

KEPANG (Y) : Ketahanan Pangan

1. Keterseediaan Pangan
2. Akses Pangan
3. Stabilitas Pangan
4. Kualitas Pangan

J. Model penelitian

Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya Badan Pusat Statistika Kulon Progo (2016). Suatu daerah dikatakan rawan pangan dapat diukur dengan banyaknya jumlah rumah tangga prasejahtera yang relatif masih banyak karena alasan ekonomi, ketersediaan pangan daerah dan kerentanan pangan.

Kerawanan pangan rumah tangga miskin pada skripsi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Setelah diketahui pengaruh dari faktor – faktor tersebut kemudian dicari strategi penanggulangan melalui kebijakan

pemerintahan, sehingga diharapkan strategi tersebut mampu meningkatkan ataupun mengurangi desa yang menjadi daerah rawan pangan, dan program kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat efektif dalam mengurangi kerawanan pangan tersebut sehingga desa rawan pangan di kabupaten Kulon Progo dapat berkurang.

Gambar 2. 7

Kerangka Berfikir Model Pengembangan Ketahanan Pangan Pada Rumah Tangga Miskin Kulon Progo.

